

PARTISIPASI KOMUNITAS PEDESAAN LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Zamhariri

ABSTRACT

This study examines community development program, i.e. TPK PNPM Mandiri in Kota Agung village and shows that level of community members' participation differs according to their capacity. In general, community members participate by giving contribution in the form of money, wealth, power, skills, and idea. However, participation by giving ideas to the program is considered low. In terms of implementation, community participation is signified by working together (gotong royong) in implementing certain development programs. Likewise, community also involves in program monitoring and evaluation.

Keywords: *participation, community development, PNPM Mandiri*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan maupun istilah pengembangan dan pemberdayaan bukanlah teori yang asing dibahas oleh beberapa ahli dalam upaya memberikan solusi terhadap problematika keumatan. Rumusan ini dirancang sedemikian rupa agar keterbelakangan, ketertinggalan, serta kemiskinan dapat teratasi atau setidaknya dapat diminimalisir. Seperti halnya realita ketertinggalan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, yang meliputi buruknya infrastruktur, kurangnya akses informasi serta kelangkaan pangan akibat sedikitnya pekerjaan sering menjadi problem yang menakutkan.

Inti dari tuntutan reformasi pembangunan di masa depan adalah meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Tuntutan ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti kehidupan masyarakat yang lebih

merata, otonom, dan terbuka, serta berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan berperan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk tumbuhnya prakarsa masyarakat.¹

Dimasa depan strategi pembangunan nasional akan lebih mempertimbangkan potensi dan dinamika perkembangan daerah dan wilayah. Perencanaan pada tingkat nasional seyogyanya hanya diarahkan kepada perencanaan yang menitik beratkan penciptaan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing wilayah. Disamping perhatian nasional juga ditujukan kepada peningkatan kapasitas wilayah-wilayah khusus dalam rangka interaksi antar wilayah atau daerah.

Intervensi program pembangunan yang memiliki karakter kepentingan nasional (*national interest*) atau bersifat strategis nasional (*national strategic*) masih tetap dilakukan oleh pemerintah pusat guna memelihara kepentingan nasional dalam rangka negara kesatuan. Contoh dari upaya pusat di dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lintas wilayah dalam rangka meningkatkan arus sumber daya lintas wilayah, dan program-program di berbagai bidang dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah, antar daerah, dan antar kelompok.²

Komponen Pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator,

¹ Deddy Supriady Bratakusumah, *Pengembangan Prakarsa dan Iklim Perekonomian Daerah*, dalam: [www.google.com/pengembangan-masyarakat/...](http://www.google.com/pengembangan-masyarakat/) Diakses pada 08 September 2015.

² *Ibid.*

pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.³

Beberapa program yang ditawarkan pemerintah untuk menunjang pembangunan dapat berupa :

1. Bantuan Langsung Masyarakat. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal. Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.
3. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program. Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.⁴

Untuk mewujudkan cita-cita luhur dalam membangun sebuah peradaban baru seperti pembangunan desa maupun pemberdayaan

³ Erni Qomariyah, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Larodange Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara*, Volume 7, Nomor 2, ISSN. 1907 – 0489, 2011, dalam: <http://242-fulteks.doc.pnpm...//> diakses pada 05 September 2015.

⁴ *Ibid.*

masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tawaran pemerintah yang menggiurkan saja, karena program sebaik apapun, alokasi dana sebanyak apapun tidak akan pernah mampu merubah tatanan pembangunan tanpa adanya dukungan kesadaran masyarakat yang menjadi objek pembangunan.

Jasa negara atau daerah terlihat dihadapan rakyatnya melalui keberhasilan menetapkan kebijakan yang diputuskan pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan setelah mempertimbangkan berbagai hal. Oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan baik dalam jajaran legislatif maupun eksekutif dituntut untuk mengoptimalkan kinerja kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk program pembangunan.⁵

Program pembangunan harus melalui proses strategik penetapan bukan saja berupa keputusan mengenai persoalan yang terjadi namun juga prosesnya (bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. Disamping itu perlu dirumuskan strategi program pembangunan juga terpenting adalah bagaimana mengimplementasikannya.⁶ Artinya ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yang mana menurut hemat penulis perlu adanya kesadaran dalam bentuk partisipasi yang kontinyu dari yang diberdayakan, dalam hal ini adalah masyarakat.

Dari hasil prasurvey penulis Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara, yang dalam aksesnya tidak luput dari perhatian pemerintah, sedikit demi sedikit telah berupaya mengimplementasikan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah baik BLSM, PNPM-Mandiri, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah infrastruktur desa sering menjadi penghambat utama perkembangan ekonomi masyarakat. Sebagaimana pengamatan penulis, di Desa Kota Agung jika dilihat dari

⁵ Gunawan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 217.

⁶ *Ibid.*

penghasilan masyarakatnya adalah Kopi, Lada dan singkong yang semestinya mampu mensejahterakan para petaninya.⁷

Namun dalam kenyataannya, karena kurang baiknya transportasi, rusaknya jalan, maka hal ini sering menjadi penghambat pembangunan baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam upaya penanggulangan problem inilah kepala Desa Kota Agung berupaya memberikan penyadaran terhadap masyarakat agar jangan ada ketergantungan terhadap program yang ada. Kemandirian masyarakat harus ada terutama dalam berpartisipasi terhadap pembangunan desa baik dengan gotong royong, menggunakan dana bantuan dengan sebaik-baiknya (dikembangkan serta dikelola), untuk kemudian digulirkan pada masyarakat lain yang memerlukannya juga.

Dari uraian ringkas di atas, penulis bermaksud meneliti lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Desa yang bisa jadi berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah judul penelitian: “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara.”

B. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ach. Wazir partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian ini seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.⁸

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

⁷ *Observasi* pada , Pada Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara 02 Agustus 2015.

⁸ Saca Firmansyah, *Partisipasi Masyarakat*, dalam: http://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi_masyarakat/ diakses pada 21 September 2015.

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁹

Lain halnya dengan Mikkelsen, ia mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti, yaitu :

- a. Partisipasi ialah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi ialah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi ialah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- d. Partisipasi ialah proses yang aktif, yang mengandung arti orang atau kelompok mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan sesuatu.
- e. Partisipasi ialah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak-dampak sosial.
- f. Partisipasi ialah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.¹⁰

Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro Tjokoroamidjojo menjelaskan bahwa :

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta : FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h. 27.

¹⁰ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 64.

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menurut hemat penulis partisipasi masyarakat dapat dimaknai dengan sumbangan atau peran serta masyarakat dalam penetapan sampai evaluasi program pembangunan masyarakat, baik melalui ajakan atau kesadaran sosial. Secara aplikatif melalui partisipasi masyarakat yang antusias berbagai program pemberdayaan akan mencapai hasil sesuai harapan.

Tingkatan-tingkatan Partisipasi

Tingkatan-tingkatan partisipasi menurut Syahyuti dapat diklasifikasikan menjadi tujuh. Tujuh tipologi ini dapat dijadikan acuan dalam proses membangun partisipasi masyarakat. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- a. Partisipasi pasif/manipulatif; masyarakat diberi tahu apa yang sedang atau telah terjadi.
- b. Partisipasi pemberian informasi; masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- c. Partisipasi melalui konsultasi; masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi.
- d. Partisipasi untuk intensif materiil; masyarakat menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja demi mendapat imbalan. Masyarakat tidak

¹¹ Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. 58.

- dilibatkan dalam proses eksperimen, masyarakat juga tidak dapat melanjutkan kegiatan pada saat insentif telah habis.
- e. Partisipasi fungsional; masyarakat membuat kelompok untuk mencapai tujuan proyek. Awalnya masyarakat bergantung pada pihak luar, selanjutnya bertindak secara mandiri.
 - f. Partisipasi interaktif; masyarakat berperan dalam analisis perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan. Masyarakat juga mempunyai peran control atas keseluruhan kegiatan.
 - g. Partisipasi mandiri; dalam hal ini masyarakat memiliki kebebasan menentukan pilihan serta menjalin kontak dengan lembaga untuk memperoleh bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan.¹²

C. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diambil dari istilah asing yaitu *Empowerment*. Gagasan pemberdayaan tidak akan terlepas dari konsep “power” atau kekuatan. Arti kekuatan disini bukan hanya mengarah kepada kekuasaan, tetapi pada kekuatan, kemampuan, potensi yang lebih berasal dalam diri orang yang diberdayakan.¹³

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : *pertama*, menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, yang merupakan makna kecenderungan primer. *Kedua*, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya¹⁴. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dapat dikatakan

¹² Driyamedia, *Tipologi Partisipasi Masyarakat*, Dalam: [http://driyamedia.org / pertukaran pengetahuan / wordpress,.. /](http://driyamedia.org/pertukaran%20pengetahuan%20wordpress.../) diakses pada 23 September 2015.

¹³ Moh.Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Pradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 161

¹⁴ *Ibid*, h. 168

bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan yang dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.¹⁵

Pemberdayaan menurut Samuel Paul adalah pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan menurut Indrasari Tjandraningsih mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.¹⁶ Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis.¹⁷

Pemberdayaan juga dapat dilihat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang.

Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah *obyek* penerima

¹⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Kusnaka Adiwiharja, 2001), h. 74

¹⁶ *Ibid*, h. 86

¹⁷ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, h.35

manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai *subyek* (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. *Kedua* Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.¹⁸

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Penyadaran*; Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri. (*self help*)
- b. *Pengkapasitasan*; Sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut *capacity building*, yang terdiri atas pengapabilitas manusia, organisasi, dan sistem nilai.
- c. *Pendayaan*; Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan

¹⁸ Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*. Dalam: www.google.com/ fdf-file.../ diakses pada 04 September 2015.

program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

- d. Tahap *capacity building* dan *networking*; Tahapan ini mencakup :
- 1) Melakukan pelatihan, workshop, dan sejenisnya untuk membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.
 - 2) Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya.
 - 3) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal
 - 4) Tahap pelaksanaan dan pendampingan
 - 5) Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat
 - 6) Tahap evaluasi mencakup :
 - a) Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan
 - b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan
 - c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi.
 - d) Tahap Terminasi; Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

D. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA KOTA AGUNG.

Menerapkan program pemberdayaan diakui atau tidak merupakan hal yang tidak mudah, apalagi jika pemberdayaan diarahkan pada

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h.251-258

masyarakat. Dengan demikian agar pemberdayaan dapat diwujudkan dibutuhkan adanya wadah yang dapat memfasilitasi dan mendukung harapan masyarakat agar terberdayakan. Dalam penelitian penulis, diawal telah tergambar bahwa program pemberdayaan di Desa Kota Agungmulai terlihat sejak adanya Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program PNPM tersebut, selain didukung adanya program pembangunan yang dimotori oleh Desa Kota Agungmelalui program-program yang ditetapkan dalam RPJM.²⁰

Hasil survei ini didukung dengan data dokumen Desa Kota Agung yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah disusun sedemikian rupa dengan berbagai macam klasifikasinya. Sebagaimana data yang ada, bidang pemberdayaan meliputi Prasarana dan sarana dasar; meliputi : penerangan listrik, penalutan, pengaspalan, pengerasan sirtu jalan, pembukaan badan jalan, dan balai Desa, Ekonomi; meliputi: penambahan los pasar, rehab los pasar, simpan pinjam kelompok perempuan. Sosial budaya; meliputi: Renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembuatan Poskamling. Pendidikan dan pelatihan; meliputi: pembangunan Gedung TPA, rehab gedung SMP, pelatihan keterampilan (kursus perbengkelan), kursus elektronik, dan pelatihan kerajinan sulam tapis, Kesehatan; meliputi: Pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Desa (Puskesmas), MCK, dan Drainase, dan Agama; meliputi: pembangunan Mushalla, perbaikan dan rehab Masjid.²¹

Masyarakat Desa Kota Agung dengan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani Kopi, lada, singkong dan lain sebagainya disamping usaha lain seperti, dagang, PNS, wiraswasta, tukang dan lain sebagainya bukan berarti tidak membutuhkan uluran tangan perhatian berbagai pihak terutama Pemerintah. Dari sektor pertanian kopi, lada dan singkong tidak akan mampu menjadi penopang utama kemandirian serta keberdayaan masyarakat tanpa ada program yang mendukung serta

²⁰ *Observasi* langsung pada Desa Kota Agung tanggal 05-10 Agustus 2015.

²¹ Dokumen RPJM –Dessa dan RKP –Desa Kota Agung tahun 2011-2015,

membantu mengarahkan mereka ke arah yang lebih berkembang. Dari sinilah keberadaan PNPM Mandiri memang sangat dibutuhkan masyarakat Desa Kota Agung. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Tahun 2008 PNPM mandiri mulai merambah ke beberapa daerah termasuk Lampung Utara²²

Respon Masyarakat terhadap beberapa program yang ditawarkan PNPM Mandiri Desa Kota Agung, bisa dikatakan sangat antusias, apalagi masalah yang diprogramkan menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat yang memang memerlukan uluran tangan Pemerintah. Adapun beberapa program yang mendapat respon positif dalam wujud partisipasi warga adalah adanya upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Permasalahan kemiskinan di Desa Kota Agung antara lain:

- a. Masih adanya warga yang menetap bekerja sebagai buruh tani
- b. Rendahnya tingkat pendidikan warga
- c. Susahnya akses dalam menjual hasil usaha tani karena kurang baiknya kondisi jalan
- d. Kurangnya keterampilan yang dimiliki warga yang tidak memiliki lahan usaha tani
- e. Rendahnya daya saing secara sehat dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.²³

Kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas, oleh Kepala Desa Kota Agung dianggap perlu diberantas melalui adanya program kerja Desa yang mengarah pada matra pemberdayaan. Menurutnya miskin bukan hanya dilihat dari tingkat ekonomi saja, namun rendahnya pendidikan juga adalah kemiskinan ilmu pengetahuan, rusaknya jalan merupakan kemiskinan fasilitas yang dapat menunjang mudahnya ke luar

²² Hidori, Warga Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 27 Agustus 2015.

²³ Bapak Hendri, Kepala Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 02 September 2015.

masuk hasil usaha tani, kurangnya keterampilan menyebabkan warga hanya terpaku pada satu usaha saja, dan rendahnya daya saing antar warga juga menyebabkan kemiskinan berkedok *qana'ah* (menerima anugrah yang telah ditetapkan) dan *tawakal* (pasrah terhadap segala ketentuan). Ketika warga tidak ada semangat bersaing secara sehat, maka begitu dan begitulah taraf hidupnya tidak akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.²⁴

Dari beberapa program pemberdayaan tersebut, hal yang dapat dilihat untuk dapat mengukur partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Persiapan

a) Sosialisasi tahap awal

Wujud partisipasi dari masyarakat tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya informasi yang disampaikan oleh pemerintah, meskipun programnya sangat baik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kota Agung. Dengan demikian perangkat Desa Kota Agung terlebih dahulu mengadakan sosialisasi program kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan yang nantinya menjadi program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Desa Kota Agung.²⁵

Menurut Bapak Hendri adanya sosialisasi pada tahap persiapan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, material, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi program pemberdayaan yang dilaksanakan dirasakan sangat penting, karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung dengan baik, akan memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut, sehingga langkah-langkah pelaksanaan program dapat

²⁴ Bapak Hendri, Kepala Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 05 September 2015.

²⁵ Bapak Hendri, Kepala Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 02 Agustus 2015.

dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disampaikan.²⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Kota Agung terkait masalah sosialisasi yang dilaksanakan Desa, Syahroni M, mengatakan bahwa:

Benar, di Desa Kota Agung setiap ada program yang akan digulirkan kepada masyarakat selalu diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Seperti halnya ketika dulu ada program PNPM-pun masyarakat diberitahu melalui perangkat Desa. Dan kami sadar bahwa program yang disosialisasikan harus diikuti karena nantinya juga akan bermanfaat bagi kami juga.

Bapak Munawir juga mengaku bahwa pada kegiatan sosialisasi ini, masyarakat mendapatkan pemberitahuan tentang acara tersebut secara langsung dari Kepala Desa Kota Agung dan melalui undangan, adapun jika ada ketidak hadiran masyarakat bukan disebabkan karena ketidakmauan mereka untuk turut berpartisipasi melainkan disebabkan karena adanya pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan.²⁷

b) Perencanaan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)

Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah. Mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui musyawarah masyarakat desa yang didahului dengan mengadakan musyawarah pembangunan di tingkat dusun yang dihadiri oleh masyarakat dusun dan dipandu oleh Kepala

Hasil Musbangdus selanjutnya dibahas dan diputuskan pada musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa serta anggota masyarakat. Selain itu dikibatkan juga oleh perangkat TPK PNPM

²⁶ Bapak Hendri, Kaur Pembangunan, *Wawancara*, tanggal 02 Agustus 2015.

²⁷ Bapak Munawir, warga Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 03 Agustus 2015

Mandiri. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).²⁸

Menurut Kepala Desa Kota Agung kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program yang akan dilaksanakan. esensi dari partisipasi ini adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi. Dari semua hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan musyawarah desa bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah dan memberikan ide atau pemikiran tentang program desa yang akan dibangun atau diberdayakan.

Jika melihat dokumen RPJM Desa Kota Agung, tercatat ada 6 program pemberdayaan masyarakat, yaitu prasarana dan sarana dasar, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan agama. Secara ringkas program pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kota Agung menurut hemat penulis dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) baik agama maupun pendidikan umum, sumber daya ekonomi (SDE) dan fisik (infrastruktur).

Kurangnya partisipasi dengan gagasan-gagasan dari warga bukan karena perangkat Kepala membatasi warga untuk mengajukan usulan dan ide-ide cemerlangnya, namun lebih disebabkan pada kesiapan warga menjalankan ide yang dipandang baik untuk dilaksanakan. Hal demikian justru dirasakan lebih mempercepat pembangunan Desa daripada terlalu banyak gagasan warga yang ujung-ujungnya sulit untuk diaplikasikan,

²⁸ Bapak Farizal, Kepala Dusun, *Wawancara*, tanggal 04 Agustus 2015.

dan umumnya terlalu banyak gagasan yang muncul lebih memicu terjadinya konflik dari pada kecepatan dalam pemberdayaan.²⁹

Meskipun terlihat bersebrangan, namun fakta menarik yang penulis saksikan, bahwa masyarakat Desa Kota Agung lebih suka menjalankan program yang telah ditetapkan dari pada ikut terlibat dalam beberapa kali rapat. Ini disinyalir keengganan warga dengan hanya membuang waktu sia-sia dalam beberapa rapat sementara pelaksanaannya entah kapan. Apalagi warga hanya dapat duduk diam dan termenung mendengarkan rapat yang inti dari rapat tersebut warga hanya menjalankan perintah. Dengan demikian warga lebih banyak memilih bekerja sebagai pelaksana ketimbang sebagai pembuat ide. Yang sering terjadi meskipun hadir dalam rapat masyarakat lebih banyak hanya menjadi pendengar.³⁰

Melalui adanya musyawarah sebagai penamaan lain dari perencanaan, secara bertahap melalui adanya Perencanaan DURK maupun RPJM-Des yang telah diasistensi dan diverifikasi oleh tim pembina, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan. DURK yang telah ditandatangani tersebut disampaikan kepada camat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikembalikan kepada kepala desa. Setelah semuanya rampung maka ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa yang didalamnya termuat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan yang dibiayai oleh program Alokasi Dana Desa.

Di dalam RKA tersebut tercantum beberapa hal, yaitu : 1). Lokasi kegiatan 2). Jenis kegiatan (Pekerjaan) 3). Jumlah anggaran 4). Indikator kinerja 5). Target Kinerja 6). Volume pekerjaan, serta 7). Upah Untuk tahun anggaran 2013-2014, dari sekian banyak usulan warga pada musyawarah desa, hanya beberapa yang dapat diakomodir dan ditetapkan

²⁹ Bapak Erwanto, Sekretaris TPK PNPM Mandiri Desa Kota Agung, *Wawancara*, tanggal 26 Agustus 2015.

³⁰ *Observasi* pada beberapa rapat Desa dan pelaksanaan Program Desa, tanggal 25 Agustus-25 September 2015.

dalam APB Desa, yaitu : (a) pembuatan talut (b). Gorong-gorong (c). Penguatan badan jalan (d). Pembangunan sarana Desa seperti Pos Ronda, Balai Desa dan MCK (e). Rehab Masjid dan (f). Pembangunan Gedung Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA).³¹

Ada beberapa pertimbangan sehingga dipilih 5 macam pembangunan diatas yaitu keterbatasan dana dan ada beberapa pembangunan yang mendapat pembiayaan dari program lain seperti PNPM Mandiri, disamping itu juga masih akan dianggarkan pada tahun berikutnya

c) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Melihat beberapa program yang ditetapkan dan ditawarkan PNPM Mandiri, Masyarakat Desa Kota Agung menunjukkan respon yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi setiap warga tidak sama, seperti halnya bentuk partisipasi yang diberikan.

Jika mengulas program pemberdayaan yang ada di Desa Kota Agung, maka tidak terlepas dari masalah Prasarana dan sarana dasar; meliputi : penalutan, pengaspalan, pengerasan sirtu jalan, pembukaan badan jalan, dan balai Desa; Ekonomi; meliputi: penambahan los pasar, rehab los pasar, simpan pinjam kelompok perempuan; Sosial budaya; meliputi: Renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembuatan Poskamling; Pendidikan dan pelatihan; meliputi: pembangunan Gedung TPA, rehab gedung SMP, pelatihan keterampilan (kursus perbengkelan), kursus elektronik, dan pelatihan kerajinan sulam tapis; Keseharan; meliputi: Pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes), MCK, dan Drainase; dan Agama; meliputi: pembangunan Mushalla, perbaikan dan rehab Masjid.

Semua hal terkait program PNPM warga masyarakat secara partisipatif telah menunjukkan responnya yang antusias dalam

³¹ Dikutip dari Dokumen Desa Kota Agung, dicatat tanggal 27 September 2015.

melaksanakan program pemberdayaan maupun pembangunan yang diprogramkan. Di antara beberapa program PNPM yang dimaksud adalah pembuatan talut, pembuatan jembatan, pembangunan sarana Desa, rehab Masjid, Pembangunan Gedung TPA, rehab gedung SMP dan kesediaan warga mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan berwiraswasta baik perbengkelan, elektronik dan juga sulam Tapis. Untuk pemberdayaan melalui pembinaan dan Pelatihan biasanya dilakukan secara berkelompok. Pengelompokan ini agar pelatihan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lebih terkontrol.

Biasanya hal yang dikeluhkan di beberapa daerah adalah mulai terkikisnya budaya kearifan lokal seperti gotong royong, namun di Desa Kota Agung dalam menggerakkan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangatlah mudah, kesadaran berpartisipasi ini didorong adanya kesadaran akan pentingnya bekerjasama dalam menyongsong pembangunan. Yang mana dengan adanya gotong royong dalam menjalankan program Desa, lambat laun manfaatnya akan dirasakan oleh warga juga.

Partisipasi dalam pemberdayaan juga ditunjukkan oleh warga dengan cara memanfaatkan adanya dana bantuan usaha yang digulirkan PNPM maupun dana yang khusus dikelola oleh kaum perempuan (SPP). Partisipasi tersebut diwujudkan dengan cara bersungguh-sungguh mengelola dana bantuan tersebut untuk modal usaha, baik usaha tani maupun untuk *Home Industri* seperti kerajinan sulam Tapis, usaha perbengkelan, elektronik dan keterampilan-keterampilan lain.³²

Upaya memberdayakan masyarakat pada dasarnya bukan hal yang sulit jika dalam komunitas sosialnya masih ada kebersamaan dan kegotongroyongan. Seperti halnya di Desa Kota Agung, meskipun tergolong daerah terbelakang, tingkat pendidikan masih rendah, namun ketika ada tawaran program yang masuk, warga masyarakat dengan

³² *Observasi*, aktivitas warga Desa Kota Agung dalam mengelola dana PNPM Mandiri, tanggal 07-12 Agustus 2015.

antusias dapat menerima dan mendukung program yang ditawarkan. Dalam menerima program tersebut masing-masing warga tidak sama tergantung kesanggupan masing-masing warga masyarakat.

PNPM Mandiri dengan beberapa program yang ditawarkan telah berupaya agar dapat memenuhi harapan pembangunan Desa serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan yang menonjol sangat urgen untuk didahulukan adalah pembangunan infrastruktur baik jalan, gorong-gorong, serta jembatan penghubung Desa, pembuatan talut pada struktur tanah yang mudah longsor dan lain sebagainya.³³ Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ikhwansyah, bahwa masyarakat pada dasarnya dengan infrastruktur yang baik ekonominya akan terbantu. Biasanya sebelum adanya jembatan penghubung antara Desa dengan lahan pertanian masyarakat kesulitan untuk membawa hasil panen yang dimilikinya. Demikian juga jalan yang baik akan mempermudah warga dalam mengeluarkan hasil Desa ke luar Desa

Dengan adanya pemberian peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, masyarakat dengan sendirinya akan timbul pola pikir yang lebih maju dan kreatif yang selanjutnya akan menumbuhkan kemandirian dalam bertindak.

d) Partisipasi dalam Evaluasi/Kontrol

Sisi lain yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat adalah keingintahuan mereka dalam jumlah alokasi dana yang digulirkan oleh Pemerintah dalam menanggulangi keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan keingintahuan tersebut, warga masyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam program pemberdayaan dengan rasa percaya tanpa kecurigaan. Tidak hanya berpartisipasi dalam pelaksanaan saja, dalam mengevaluasi hasil program kerja Desa Kota Agung juga, warga tetap menunjukkan andilnya dalam mempertahankan dan menjaga hasil pembangunan Desa Kota Agung.

³³ Bapak Ahmad, Kaur Pembangunan, *Wawancara*, tanggal 09 September 2015.

Secara umum partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pemberdayaan yang dimotori oleh PNPM Mandiri berdasarkan data yang penulis peroleh dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

a. Evaluasi ketika program dilaksanakan

Disadari atau tidak, ketika warga terlibat secara aktif berpartisipasi dalam program Desa Kota Agung, kehadiran mereka selain sebagai pekerja, mereka juga dapat mengawasi jalannya pelaksanaan program. Seperti dalam pembuatan talut, jika yang mengerjakan adalah warga masyarakat setempat, penyimpangan akan dapat diawasi dan diluruskan kembali. Tidak hanya demikian, keterlibatan warga secara terus menerus setidaknya dapat memantau jumlah penggunaan bahan-bahan dan modal pembangunan, apakah sesuai dengan target atau ada pengurangan.

Adanya saling mengingatkan antara satu warga dengan warga lain ketika akan melakukan kecurangan dalam pembangunan memang diperlukan, dan hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh warga Desa Kota Agung, apalagi jika penyimpangan yang dilakukan menyangkut fasilitas umum yang dapat digunakan oleh banyak orang. Termasuk mengawasi aktivitas para pelaksana program atau pengurus TPK pun tidak luput dari pengawasan warga.

Partisipasi dalam evaluasi ketika program dilaksanakan juga diwujudkan dalam bentuk penggunaan dana bergulir maupun pinjaman sesuai dengan alokasinya. Artinya jika warga menggunakan dana PNPM untuk kepentingan usaha, ia akan menggunakan dan menjaga dana tersebut sesuai dengan tujuan awal peminjaman. Dan ketika dana tersebut sudah waktunya dikembalikan, timbul kesadaran untuk mengembalikannya.

b. Evaluasi setelah program dilaksanakan

Sebagaimana dari hasil survey penulis, program pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Agung diarahkan pada beberapa sisi, yaitu sisi pemberdayaan melalui pembangunan fisik, pemberdayaan melalui

pemberian pembinaan dan pelatihan serta bantuan dana pinjaman untuk modal usaha. Dalam hal ini partisipasi untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakanpun berbeda-beda, di antaranya:

- 1) Untuk pembangunan fisik seperti pembuatan talut, pemasangan onderlaht, pembuatan gorong-gorong, pembuatan jembatan ayun, rehab Masjid, pembangunan gedung TPA dan SMP, masyarakat mengukur sejauhmana kekuatan bangunan yang telah dibuat, juga melihat beberapa kekurangan dan kelebihan dari hasil pembangunan.
- 2) Untuk pemberdayaan dalam bentuk penguatan potensi keterampilan masyarakat seperti pelatihan perbengkelan, elektrobik dan sulam tapis, masyarakat melakukan evaluasi dengan melihat hasil dari pelatihan dan pembinaan yang diberikan. Jika dengan pelatihan belum dapat meberdayakan potensi masyarakat, maka perlu diadakan kajian ulang dengan melihat sisi potensi keterampilan lain yang benar-benar sesuai dengan minat masyarakat.
- 3) Untuk pemberdayaan melalui bantuan permodalan baik SPP maupun usaha lain, masyarakat selain menggunakan dana tersebut, berupaya mengembalikannya ketika sudah waktunya. Partisipasi dalam evaluasi juga ditunjukkan dengan bukti telah mampu berdikari secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Partisipasi sebagai suatu bentuk andil atau keikutsertaan dalam suatu sangatlah diperlukan sebagaimana dalam program pemberdayaan masyarakat. Sebaik apapun program, tanpa adanya partisipasi masyarakat akan sulit terwujud. Kajian partisipasi dalam analisa ini, membahas beberapa bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan yang dimotori oleh Desa Kota Agung yang berada di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara. Mengawali analisa ini, perlu diulas kembali bahwa partisipasi merupakan keterlibatan dalam penentuan arah, kebijakan, tanggung jawab, dan memperoleh hasil dari suatu proses pembangunan maupun pemberdayaan.

Jika partisipasi diarahkan terhadap gerakan masyarakat dalam memikul suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah, maka partisipasi dapat berwujud keragaman andil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing masyarakat. Demikian halnya di Desa Kota Agung dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang telah ditetapkan dalam RPJM maupun melalui PNPM Mandiri, partisipasi yang diberikan masyarakatpun berbeda-beda antara satu warga dengan lainnya. Perbedaan tersebut nampaknya terjadi terkait dengan kapasitas kesiapan dan kemampuan masing-masing warga.

Analisa tersebut menurut hemat penulis terkait dengan fenomena yang ada pada kondisi sosial masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, yang tentunya antusias bentuk partisipasi tidak akan sampai pada tataran memberikan tanggapan, dan merencanakan program. Selain itu warga Desa Kota Agung lebih suka ikut andil dalam pelaksanaan program yang telah disediakan oleh Desa dan PNPM dari pada harus sibuk membahas program yang akan dilaksanakan.

Sisi menariknya kesadaran warga dalam memberikan sumbangan baik dengan uang dan lain sebagainya diberikan dengan tanpa adanya intervensi dari pihak lain maupun aparat pemerintahan. Selain itu dalam pelaksanaan program pemberdayaan meskipun telah ada alokasi dana dari Pemerintah masyarakat tetap mau memberikan bantuannya jika dibutuhkan. Ada juga kesadaran warga jika berhalangan ikut serta melakukan kegiatan desa seperti gotong royong, dengan sendirinya ia akan menggantikan ketidak hadirannya dengan memberikan uang untuk keperluan bersama.

E. Respon Masyarakat dalam Pelaksanaan dan Evaluasi Program Pemberdayaan di Desa Kota Agung

Masyarakat Desa Kota Agung ada yang bekerja sebagai petani, buruh tani, pertukangan, PNS, dan ada yang tidak menentu. Petensi yang paling unggul adalah bekerja sebagai petani mencapai 1.013 orang.

Berbicara masalah usaha tani di Desa Kota Agung secara rasional yang tergambar adalah kemandirian dan taraf hidup yang tercukupi. Adanya asumsi ini didukung dengan realita yang ada bahwa mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani Kopi dan Lada, juga singkong.

Fakta yang terjadi berdasarkan pengakuan warga Desa Kota Agung justru sebaliknya, usaha tani dan lain sebagainya bukan suatu jaminan dapat menunjang kebutuhan hidup dan memandirikan masyarakat tanpa ada perhatian dari pihak lain terutama Pemerintah. Sejalan dengan keluhan masyarakat Desa Kota Agung terkait masalah sulitnya akses ke luar desa karena buruknya infrastruktur desa yang berakibat rendahnya daya jual, belum adanya program yang dapat membantu memberikan modal kepada masyarakat lemah, pada Tahun 2008 Pemerintah secara serentak mengadakan program pemberdayaan yang di kenal dengan PNPM Mandiri.

Jika mengkaji sejauh mana respon yang diberikan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dimotori oleh PNPM Mandiri maupun Desa Kota Agung tentu sangat tinggi. Apalagi program yang ditawarkan merupakan program yang dapat menunjang keberdayaan dan kemandirian masyarakat Desa Kota Agung.

Pemberdayaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, ruhaniah, intelektual dan ekonomi. Tiga bidang ini jika diselaraskan dengan program yang ada di Desa Kota Agung akan terlihat memiliki kesamaan. Hanya saja pada program pemberdayaan di Desa Kota Agung pengelompokannya menjadi 7 bagian, sarana, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan agama. Melihat pembagian program pemberdayaan di Desa Kota Agung yang diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat agar mampu hidup mandiri dan bersaing secara sehat, sedikit banyak telah memberikan kontribusinya dalam merambah bidang-bidang pemberdayaan.

Jika program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu respon yang diberikan masyarakatpun akan tinggi.

Untuk membangun partisipasi masyarakat baik dalam pelaksanaan dan evaluasi jika melihat konsep proses pemberdayaan perlu adanya penyadaran, pengkapasitasan, pendayaan, *capacity building dan networking*. Setelah 4 proses ini diterapkan pada masyarakat dengan sendirinya akan timbul kemauan untuk berpartisipasi secara suka rela. Sejalan dengan proses pemberdayaan secara konseptual tersebut, secara aplikatif PNPM Mandiri Desa Kota Agung juga tidak serta merta mengharapkan adanya partisipasi tanpa program yang jelas. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan terlebih dahulu dilakukan proses pemberdayaan melalui beberapa komponen: pengembangan masyarakat; mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Agar proses pengembangan tersebut dapat terwujud, PNPM sebagai motor penggerak telah menyediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan PNPM Mandiri agar programnya dapat diterima dan memunculkan partisipasi masyarakat adalah adanya bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Pada proses ini, sisi manfaat terakhir yang dapat diambil adalah adanya evaluasi dan pengembangan program.

Partisipasi pada dasarnya bukan hanya dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program. Lebih dari itu pemeliharaan terhadap hasil dari suatu program sangatlah diperlukan. Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan dalam evaluasi program

dikategorikan menjadi dua: partisipasi ketika program dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan.

Dalam proses pemberdayaan ada suatu konsep yang menyatakan bahwa tahap evaluasi mencakup pemantauan terhadap pemberdayaan yang dilakukan, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dalam tahapan pemberdayaan yang dilakukan, dan mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul berkenaan dengan tahapan pemberdayaan. Di Desa Kota Agung praktik evaluasi yang dilakukan masyarakat dilakukan seiring berjalannya program yang dikerjakan. Selain itu warga juga telah berupaya untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya untuk tidak melakukan kecurangan karena manfaat pembangunan tetap akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga selain melaksanakan program yang telah dibebankan kepada mereka tetap melakukan pengawasan terhadap para pengambil kebijakan termasuk pengurus TPK PNPM Mandiri Desa Kota Agung.

Evaluasi juga dilakukan setelah program dilakukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk melihat keberhasilan dari program yang telah terlaksana. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program pemberdayaan, apa yang diharapkan sedikit demi sedikit akan terwujud. Melalui partisipasi dalam memberikan evaluasi juga program-program yang ada akan terpelihara dan dapat dikembangkan.

F. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kota Agung oleh TPK PNPM Mandiri, setiap masyarakat menunjukkan partisipasinya dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ada yang berpartisipasi dengan uang, harta, tenaga, keterampilan dan ide. Dari semua bentuk partisipasi tersebut, hanya andil dalam bentuk ide yang kurang terungkap dari masyarakat. Dengan demikian suatu gagasan atau ide yang semestinya

muncul sebagai penguat program pemberdayaan, justru memiliki respon yang rendah.

Respon masyarakat dalam menunjukkan partisipasinya dalam pelaksanaan dan evaluasi program terlihat sangat antusias. Semangat masyarakat dalam berpartisipasi timbul karena kesadaran masing-masing dan sebagai bentuk menyambut program pemberdayaan yang memang selama ini mereka tunggu-tunggu. Respon yang sangat terlihat adalah giatnya masyarakat dalam bergotong royong dalam melaksanakan beberapa program yang telah ditetapkan di Desa Kota Agung. Adapun respon dalam mengevaluasi program dilakukan dengan dua cara; ketika program berlangsung, dan setelah program terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2008).
- Adi Fahrudin (ed), *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, t.th).
- Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas* (Cet. III; Bandung: Armico, 1994).
- Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Cholid Nurboko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).

Das Lestari, *Partisipasi Masyarakat*, Dalam: [www//artikata.com/arti343864-partisipasi/](http://www.artikata.com/arti343864-partisipasi/) diakses pada 23 September 2015.

Deddy Supriady Bratakusumah, *Pengembangan Prakarsa dan Iklim Perekonomian Daerah*, dalam: [www.google.com/pengembangan-masyarakat/...](http://www.google.com/pengembangan-masyarakat/) Diakses pada 08 September 2015.

Driyamedia, *Tipologi Partisipasi Masyarakat*, Dalam: [http://driyamedia.org / pertukaran pengetahuan / wordpress,.. /](http://driyamedia.org/pertukaran-pengetahuan-wordpress) diakses pada 23 September 2015.

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

-----, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003).

Erni Qomariyah, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Larodangge Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara*, Volume 7, Nomor 2, ISSN. 1907 – 0489, 2011, dalam: [http//242-fulteks.doc.pnpm.../](http://242-fulteks.doc.pnpm.../) diakses pada 05 Juni 2013.

Gunawan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Hamijoyo, Pasaribu dan Simanjuntak, *Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi*, Dalam: [www/canboyz. co.cc/ /2010/05/ pengertian-pasrisipasi.html../](http://www.canboyz.co.cc/2010/05/pengertian-pasrisipasi.html) diakses pada 20 September 2015.

Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Kusnaka Adiwiharja, 2001).

Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1983).

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Social Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002).

-----, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta : FISIP Universitas Indonesia Press, 2007).

Lalu Agus Faturrahman, *Pelapisan Sosial dan Kesatuan Derajat*, Ilmu Sosial Dasar ed. Josef Riwu Koho (Surabaya : Usaha Nasional, 1986).

Lestari, *Pengertian Partisipasi*, dalam: <http://www.google.com//Wikipedia..//> diakses pada 20 September 2015.

M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Researc*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).

M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Moh.Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Pradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2001).

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media. Dalam: www.google.com//fdf-file.../ diakses pada 04 September 2015.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 2002).
- Sumardi Ramon, *Sosiologi dan Antropologi*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1985).
- Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003).
- Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002*. Dalam: www.google.com/dfd-file.../ diakses pada 04 September 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973).
- Totok Madikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Widodo, *Glosarium Undang-undang*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008).